



## SUFISME SEBAGAI AGEN STABILITAS SOSIAL DALAM KONTEKS PASCAGONFLIK STUDI KASUS MESIR PASCA-ARAB SPRING

**Muhammad Nur Hidayatulloh**

Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Budaya Timur Tengah

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Email: muhammadnurhidayatulloh@mail.ugm.ac.id

### Abstract (English)

This article examines the role of Sufism as a social force in post-conflict stabilization in Egypt following the Arab Spring. Drawing on qualitative research and social theory frameworks, this study situates Sufi orders not merely as spiritual communities but as social agents that actively shape public ethics, maintain communal cohesion, and cultivate a peaceful religious imagination. In a society marked by political turbulence and social fragmentation, Sufi orders emerge as providers of spiritual solace and social stability through inclusive and non-violent religious practices. By analyzing the interplay between Sufi groups, the state, and civil society, as well as the moral symbolism they promote, the article reveals how Sufism operates both as religious soft power and as social capital contributing to reconciliation processes. The findings suggest that Sufi traditions can play a constructive role in post-conflict nation-building, offering not just cultural heritage but contemporary relevance in fostering peace.

### Article History

Submitted: 5 Juli 2025

Accepted: 8 Juli 2025

Published: 9 Juli 2025

### Key Words

Sufism, social stability, post-conflict, Arab Spring, tariqa, Egypt

### Abstrak (Indonesia)

Artikel ini mengkaji peran sufisme sebagai kekuatan sosial dalam membangun stabilitas pascakonflik di Mesir setelah peristiwa Arab Spring. Berangkat dari studi kualitatif berbasis telaah literatur dan pendekatan teori sosial, tulisan ini menempatkan tarekat sufi tidak hanya sebagai komunitas spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang aktif membentuk etika publik, menjaga kohesi sosial, dan merawat imajinasi kolektif keagamaan yang damai. Dalam situasi negara yang mengalami turbulensi politik dan disintegrasi sosial, tarekat hadir sebagai agen yang menawarkan ketenangan spiritual dan stabilitas sosial melalui praktik-praktik keagamaan yang inklusif dan anti-kekerasan. Dengan menelusuri relasi tarekat dengan negara, masyarakat sipil, serta simbolisme moral yang mereka bangun, artikel ini menyoroti bagaimana sufisme berfungsi sebagai religious soft power sekaligus modal sosial yang berkontribusi dalam proses rekonsiliasi pascakonflik. Temuan ini memperlihatkan bahwa tarekat dapat menjadi bagian dari solusi sosial, bukan sekadar warisan budaya atau reliik spiritual masa lalu.

### Sejarah Artikel

Submitted: 5 Juli 2025

Accepted: 8 Juli 2025

Published: 9 Juli 2025

### Kata Kunci

sufisme, stabilitas sosial, pascakonflik, Arab Spring, tarekat, Mesir

## Pendahuluan

Pasca-Arab Spring, Mesir mengalami guncangan sosial-politik yang tidak hanya mengubah struktur kekuasaan, tetapi juga mengoyak tenunan sosial masyarakatnya. Revolusi yang digerakkan oleh aspirasi keadilan dan demokrasi justru menyisakan ketidakstabilan politik, polarisasi ideologis, serta trauma kolektif. Dalam kekosongan otoritas yang muncul pascarezim Mubarak, institusi-institusi negara formal tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan rakyat akan rasa aman, kohesi sosial, dan ketertiban simbolik (Brown, 2013; Wedeen, 2019). Dalam konteks inilah, muncul pertanyaan penting: siapa aktor-aktor non-negara yang dapat mengisi kekosongan tersebut dan membangun ulang rasa keberimanannya bersama yang damai?

Salah satu aktor yang kerap terpinggirkan dalam narasi politik pasca-Arab Spring adalah tarekat sufi. Selama ini, sufisme lebih sering diposisikan sebagai warisan mistik atau tradisi





spiritual yang bersifat privat, tanpa kontribusi langsung terhadap kehidupan sosial dan politik. Padahal, dalam sejarah sosial Islam, tarekat telah berperan sebagai institusi moral, pengelola jaringan solidaritas, bahkan sebagai penghubung antara masyarakat dan kekuasaan—dengan corak yang cenderung nonkonfrontatif dan dialogis (Chittick, 2007; Knysh, 2010). Dalam situasi pascakonflik, kekuatan-kekuatan simbolik dan kultural seperti tarekat justru memiliki keunggulan: mereka tidak hadir sebagai kekuatan koersif, melainkan sebagai penyalur nilai, pengikat afeksi, dan pengelola narasi damai.

Kajian ini bertolak dari asumsi bahwa tarekat sufi tidak sekadar institusi spiritual, tetapi juga merupakan aktor sosial yang beroperasi dalam wilayah liminal antara negara, masyarakat sipil, dan tradisi keagamaan. Spiritualitas yang mereka bawa tidak berdiri di luar sejarah, melainkan menyatu dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam Mesir. Dengan demikian, memahami peran sufisme berarti memahami cara kerja stabilitas sosial yang tidak bersifat formal dan struktural, melainkan kultural, simbolik, dan partisipatif.

Namun demikian, studi-studi kontemporer mengenai Islam pasca-Arab Spring masih didominasi oleh perhatian terhadap kelompok Islam politik, salafi, dan aktor radikal. Jarang sekali penelitian yang menyoroti peran kekuatan spiritual moderat seperti tarekat dalam menjaga keberlanjutan sosial pasca kerusuhan politik. Sebagaimana dicatat oleh Skovgaard-Petersen (2014), banyak tarekat di Mesir menunjukkan peran signifikan dalam pemulihan komunitas akar rumput, tetapi luput dari perhatian dalam narasi besar transisi politik. Kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan tarekat sebagai fokus analisis, bukan sebagai ornamen kultural, melainkan sebagai agen yang hidup, adaptif, dan memiliki agensi dalam ranah publik.

Bertolak dari kerangka teoritis Émile Durkheim mengenai agama sebagai perekat solidaritas sosial (Durkheim, 1995), serta Talal Asad yang menekankan dimensi historis dan diskursif dari praktik keagamaan (Asad, 1993), tulisan ini akan membahas bagaimana sufisme di Mesir memainkan fungsi stabilizer dalam masyarakat pascakonflik. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis interpretatif, penelitian ini menyoroti bentuk-bentuk keterlibatan tarekat dalam menjaga stabilitas, memperkuat etika publik, dan menyeimbangkan relasi antara agama dan kekuasaan. Artikel ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang potensi spiritualitas Islam sebagai modal sosial dalam proses nation building yang berkelanjutan dan damai.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) dan metode analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna simbolik, narasi sosial, dan konstruksi diskursif yang mengitari peran tarekat sufi dalam konteks pascakonflik Mesir. Studi ini tidak berpretensi menyajikan data statistik atau pengukuran kuantitatif, melainkan berupaya menangkap dinamika sosial dan keagamaan melalui pembacaan interpretatif atas teks, praktik, serta relasi sosial yang berlangsung dalam ranah spiritual dan politik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur akademik, laporan lapangan dari lembaga riset dan media internasional, arsip digital, serta kajian historis mengenai tarekat sufi di Mesir. Literatur utama mencakup karya-karya dari Émile Durkheim (1995) mengenai fungsi sosial agama, Talal Asad (1993) tentang konstruksi historis-diskursif agama, serta telaah kontemporer tentang sufisme dan masyarakat sipil dari Alexander Knysh (2010), Jakob Skovgaard-Petersen (2014), dan Fawaz Gerges (2018). Selain itu, digunakan pula laporan dari International Crisis Group dan Brookings Institution untuk mendapatkan konteks sosial-politik yang relevan.



Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis sebagaimana dikembangkan oleh Norman Fairclough (2003), yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang memproduksi, mempertahankan, atau menantang struktur kuasa. Dalam konteks ini, tarekat tidak dilihat hanya sebagai objek religius, melainkan sebagai pelaku sosial yang memproduksi wacana stabilitas, rekonsiliasi, dan resistensi dalam hubungan dengan negara dan masyarakat. Analisis dilakukan melalui tiga lapis: (1) analisis teks—mencakup simbol, narasi, dan bahasa keagamaan tarekat; (2) analisis praktik diskursif—menelaah bagaimana tarekat menyampaikan pesan mereka dalam ruang publik; dan (3) analisis praktik sosial—menelusuri bagaimana tarekat berinteraksi dengan struktur sosial dan politik pascakonflik di Mesir.

Validitas kajian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan referensi silang antarjenis literatur. Interpretasi didasarkan pada konteks historis dan sosial yang kompleks, dengan kesadaran kritis terhadap bias ideologis dari sumber-sumber yang digunakan. Peneliti juga menerapkan prinsip *reflexivity*, yakni kesadaran posisi peneliti dalam relasi pengetahuan, untuk menjaga obyektivitas dalam membaca realitas sufistik.

Dengan metode ini, diharapkan analisis yang dihasilkan mampu menangkap kompleksitas fungsi tarekat dalam masyarakat Mesir kontemporer, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran spiritualitas dalam dinamika pascakonflik secara teoritis maupun praksis.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks Mesir pasca-Arab Spring, munculnya disintegrasi sosial, kebuntuan politik, dan lemahnya kepercayaan terhadap institusi formal menciptakan ruang bagi aktor-aktor non-negara untuk memainkan peran sosial yang krusial. Tarekat sufi, yang sebelumnya dianggap apolitis atau bahkan terpinggirkan, justru menunjukkan kapasitas sosial yang signifikan dalam menstabilkan ruang publik melalui spiritualitas yang inklusif dan non-konfrontatif.

### 1. Tarekat sebagai “Stabilizer Sosial” Pascakonflik

Pasca tergulingnya rezim Mubarak dan gejolak kekuasaan antara Ikhwanul Muslimin dan militer, masyarakat Mesir menghadapi fragmentasi sosial yang dalam. Dalam situasi tersebut, tarekat-tarekat seperti Al-Rifa’iyyah, Al-Badawiyyah, dan Syadziliyah tidak hanya bertahan, tetapi justru menguat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat rutin, merakyat, dan menenangkan. Majelis dzikir, haul para wali, hingga distribusi sosial-karitatif menjadi bentuk intervensi sosial yang menciptakan ruang perjumpaan dan peredam ketegangan antar kelompok. Peran ini dapat dibaca sebagai bentuk *religious soft power* yang tidak beroperasi melalui kekuasaan formal, tetapi melalui kehadiran simbolik dan moral (Mandaville, 2014).

Fungsi ini sejajar dengan konsep Durkheim (1995) yang memandang agama sebagai mekanisme pembentuk solidaritas kolektif. Dalam masyarakat yang mengalami disorientasi pascakonflik, praktik-praktik sufistik menghadirkan keteraturan simbolik dan menyusun kembali makna hidup bersama melalui pengalaman spiritual yang dibagi. Sebagai peneliti yang tinggal langsung di Mesir dan aktif dalam tarekat Syadziliyah, penulis menyaksikan bagaimana peran tarekat justru menguat di masa krisis, tidak hanya sebagai ruang kontemplatif, tetapi juga sebagai arena solidaritas sosial.

Dalam pengamatan penulis, majelis-majelis dzikir yang diselenggarakan secara berkala, terutama di sekitar kawasan Sayyid Ahmad al-Badawi di Tanta dan Abul Hasan al-Syadzili di Humaitara, menjadi magnet sosial yang melampaui kelas, mazhab, dan afiliasi politik. Tidak sedikit warga sipil yang datang bukan semata untuk ritual, tetapi untuk merasakan atmosfer aman, tenang, dan terbebas dari retorika kekerasan atau agitasi ideologis. Seorang mursyid tarekat di



Kairo menyampaikan kepada penulis, “*Kami tidak bicara politik, kami menjaga hati orang agar tidak rusak.*” Ungkapan sederhana ini mencerminkan sikap tarekat sebagai penjaga kedamaian batin sekaligus pemulih trauma sosial.

## 2. Ambivalensi antara Kooptasi dan Kemandirian

Namun, kehadiran tarekat dalam ruang publik tidak sepenuhnya bebas dari dinamika kekuasaan. Di bawah rezim Al-Sisi, banyak tarekat memperoleh legalitas dan dukungan simbolik dari negara sebagai bagian dari agenda kontra-ekstremisme. Ini memperlihatkan adanya strategi kooptasi terhadap otoritas moral tarekat. Pemerintah menggunakan citra tarekat sebagai “Islam moderat” untuk menyeimbangkan ancaman radikalisme dan mengontrol kehidupan keagamaan secara lebih terstruktur (Hamid, 2016).

Situasi ini menciptakan ambivalensi. Di satu sisi, kedekatan dengan negara memberi tarekat akses dan legitimasi; di sisi lain, hubungan yang terlalu erat dengan kekuasaan berpotensi menggerus otonomi spiritual dan menimbulkan resistensi dari masyarakat yang kritis. Beberapa tarekat, terutama yang memiliki akar sosial yang kuat, memilih menjaga jarak dan tetap berfokus pada misi moral tanpa terjerat agenda politik formal. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan beberapa tarekat di pedesaan dan kawasan tradisional yang menolak menampilkan diri secara berlebihan dalam media massa atau platform politik, tetapi tetap menjalankan misi sosial dengan konsisten.

Daya lenting ini menunjukkan bahwa tarekat bukan entitas tunggal, melainkan ekosistem religius yang dinamis, penuh negosiasi antara nilai, kepentingan, dan konteks. Sebagian memilih integrasi dengan negara sebagai jalan pragmatis menjaga eksistensi, sementara yang lain bertahan dalam sikap otonom sebagai bentuk kesetiaan pada prinsip-prinsip spiritualitas.

## 3. Tarekat sebagai Tafsir Alternatif terhadap Islam Politik

Dalam benturan antara Islamisme politis dan otoritarianisme sekuler, tarekat menyuguhkan model keberislaman yang tidak menuntut kekuasaan formal tetapi hadir dalam ruang transformatif sosial-kultural. Islam yang ditawarkan tidak berbasis ideologi negara atau perebutan kekuasaan, tetapi pada praktik cinta, kebersamaan, dan kedalaman batin. Ini menawarkan bentuk “etika oposisi senyap” yang tidak frontal, tetapi subversif dalam makna—yakni melawan dengan nilai.

Talal Asad (1993) membantu membaca bahwa ekspresi keagamaan seperti tarekat harus dilihat dalam konfigurasi wacana dan relasi kuasa. Tarekat bukan oposisi politik dalam pengertian struktural, tetapi mereka menghadirkan kritik melalui cara hidup yang berbeda: menolak kekerasan, menolak penyeragaman, dan memelihara keberagaman ekspresi keagamaan. Dalam tataran praksis, sikap-sikap sufistik ini memberi alternatif bagi publik Mesir yang letih dengan konflik politik dan kehilangan ruang spiritual netral.

Dalam pengalaman penulis mengikuti majelis Syadziliyah di Mesir, para murid tarekat secara konsisten menolak membicarakan politik praktis. Mereka lebih banyak berdiskusi tentang sabar, keikhlasan, serta pentingnya mencintai sesama muslim meskipun berbeda pandangan. Diskursus ini memperlihatkan adanya *politik spiritual* yang menawarkan jalan damai tanpa harus memosisikan diri sebagai oposisi eksplisit terhadap negara, tetapi cukup dengan memperluas wilayah kasih dan ketenangan dalam masyarakat.

## Kesimpulan dan Implikasi

Kajian ini menunjukkan bahwa sufisme, melalui institusi sosial tarekat, memainkan peran yang tidak dapat diremehkan dalam proses stabilisasi sosial pasca-Arab Spring di Mesir. Dalam situasi yang ditandai oleh polarisasi ideologis, keruntuhan kepercayaan terhadap institusi formal,



serta trauma sosial yang mendalam, tarekat hadir sebagai kekuatan alternatif yang membangun stabilitas dari bawah. Praktik-praktik spiritual seperti dzikir berjamaah, haul para wali, dan distribusi karitatif bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang menenangkan, menyatukan, dan merekatkan masyarakat dalam ruang bersama yang damai.

Temuan ini menegaskan bahwa tarekat bukan entitas pasif atau hanya berorientasi ke dalam, melainkan aktor sosial yang aktif dan adaptif. Spiritualitas yang mereka usung tidak lepas dari konteks sejarah dan kekuasaan; ia adalah kekuatan moral yang melekat dalam keseharian umat dan menjelma menjadi praktik sosial yang efektif. Fungsi mereka sebagai *stabilizer* terjadi bukan melalui dominasi, tetapi melalui daya simbolik dan etika keberagaman yang mereka rawat. Ini sejalan dengan kerangka Émile Durkheim tentang agama sebagai fondasi solidaritas sosial, serta kerangka Talal Asad yang melihat agama sebagai praktik diskursif yang terus dinegosiasikan dalam medan kuasa.

Namun demikian, posisi tarekat di Mesir juga berada dalam ketegangan antara kooptasi oleh negara dan upaya menjaga otonomi moral. Hubungan yang terlalu dekat dengan kekuasaan membawa risiko hilangnya legitimasi spiritual di mata publik, sementara sikap oposisi terbuka berpotensi meminggirkan peran mereka secara struktural. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kecerdasan sosial tarekat menjadi kunci untuk tetap relevan tanpa kehilangan esensi transendennya. Dalam konteks ini, model sufisme Mesir menawarkan satu bentuk *politik spiritual* yang beroperasi dalam ruang sosial tanpa menjadi instrumen ideologis negara maupun gerakan politik.

Implikasi dari temuan ini bersifat multidimensi. Pertama, dari sisi akademik, studi ini membuka ruang baru untuk memahami sufisme sebagai kekuatan sosial dan bukan semata warisan kultural. Pendekatan terhadap tarekat perlu digeser dari orientasi normatif-mistik ke arah pendekatan yang lebih sosiologis, politis, dan diskursif. Studi-studi ke depan dapat mengeksplorasi bagaimana tarekat berperan dalam konteks lain yang mengalami konflik atau transisi demokrasi, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara.

Kedua, dalam ranah kebijakan, hasil penelitian ini memberikan argumen kuat bagi pemerintah di negara-negara pascakonflik untuk melihat tarekat bukan sebagai ancaman atau ornamen keagamaan, melainkan sebagai mitra potensial dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga perdamaian sosial. Namun, keterlibatan ini harus dikelola dengan prinsip resiprositas dan pengakuan terhadap otonomi spiritual tarekat, bukan dalam kerangka manipulatif atau instrumentalistik.

Ketiga, pada tataran sosial, masyarakat sipil dan umat Islam secara umum perlu diberi ruang untuk merevitalisasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan publik. Etika sufistik seperti tawadhu', sabar, cinta kasih, dan penerimaan terhadap perbedaan bisa menjadi fondasi etik alternatif dalam dunia yang kian terfragmentasi dan terpolarisasi. Dalam konteks ini, spiritualitas bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bentuk partisipasi sosial yang konstruktif dan berkelanjutan.

Akhirnya, posisi penulis sebagai pelaku tarekat Syadzilyah yang tinggal langsung di Mesir memberikan perspektif reflektif atas praktik sufisme yang hidup dan dinamis di tengah pusaran konflik dan wacana kekuasaan. Spiritualitas dalam kerangka ini bukan pelarian dari realitas, tetapi justru sarana untuk menghadapi realitas dengan cara yang lebih jernih, beradab, dan manusiawi.

## Daftar Pustaka

Asad, T. (1993). *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.



- Brown, N. J. (2013). *When Victory Becomes an Option: Egypt's Muslim Brotherhood Confronts Success*. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved from <https://carnegieendowment.org/2013/01/28/when-victory-becomes-option-egypt-s-muslim-brotherhood-confronts-success>
- Chittick, W. C. (2007). *Sufism: A Short Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life* (K. E. Fields, Trans.). New York: The Free Press. (Original work published 1912)
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Gerges, F. A. (2018). *Making the Arab World: Nasser, Qutb, and the Clash That Shaped the Middle East*. Princeton: Princeton University Press.
- Hamid, S. (2016). *Islamic Exceptionalism: How the Struggle over Islam is Reshaping the World*. New York: St. Martin's Press.
- Knysh, A. (2010). *Islamic Mysticism: A Short History*. Leiden: Brill.
- Mandaville, P. (2014). *Islam and Politics* (2nd ed.). London: Routledge.
- Skovgaard-Petersen, J. (2014). The Muslim Brotherhood and the Sufi Orders. In *Middle East Report*, (272), 12–17. Retrieved from <https://merip.org>
- Wedeen, L. (2019). *Authoritarian Apprehensions: Ideology, Judgment, and Mourning in Syria*. Chicago: University of Chicago Press.